

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAMPUNG WISATA PRAIJJING DI DESA TEBARA KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT

Author

¹Yoseph Molla✉, ²Tjahya Supriatna, ³Layla Kurniawati

Affiliation:

^{1,2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Email:

¹ mollajryoseph@yahoo.com, ² tjahya_supriatna@ipdn.ac.id, layla_kurniawati@ipdn.ac.id

Received: July 03, 2021

Revised : July 05, 2021

Accepted: July 14, 2021

Available Online: December 01, 2021

✉ **Corresponding author**

Yoseph Molla

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

e-Mail: mollajryoseph@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengamati proses dan faktor-faktor *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng di desa Tebara kecamatan kota Waikabubak. Metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash (2007) digunakan sebagai kajian analisis dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kampung wisata Praiijng belum berjalan secara efektif dilihat dari kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi yang menghasilkan model kolaborasi di kampung wisata Praiijng. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng di lapangan seperti faktor Budaya, Lembaga pengelola, anggaran, letak geografis, masyarakat, Sumber daya manusia, atraksi budaya, penataan, kebijakan pemerintah daerah, aksesibilitas daerah, teknologi, daya saing obyek wisata sejenis dan pergeseran nilai budaya yang akan menjadi tantangan kedepan.

Kata Kunci : pemerintahan kolaborasi, Kampung Wisata, Praiijng

Abstract

The purpose of this study is to observe the process and factors of Collaborative Governance in the management of Praiijng tourism village in Tebara village, Waikabubak city district. The qualitative descriptive method with the Collaborative Governance theory approach from Ansell and Gash (2007) is used as theoretically based in this study. The techniques of data collection are through interviews, documentation, and observations. This is due to the influence of internal and external factors in the management of Praiijng tourism village in the field such as cultural factors, institutional management, budgets, geographical location, community, human resources, cultural attractions, structuring, local government policies, regional accessibility, technology, the competitiveness of similar tourism objects and cultural value shifts that will be challenged in the future.

Keywords : Collaborative Governance, Tourism Village, Praiijng.

Pendahuluan

Kolaborasi menjadi salah satu kekuatan era Revolusi Industri 4.0. Demikian pula halnya dengan kolaborasi pada sektor pemerintahan juga menjadi kekuatan tersendiri dalam menunjang keberhasilan tata kelola pemerintahan. *Collaborative governance* menjadi salah satu acuan dalam sebuah proses kegiatan pemerintahan dimana dengan berkolaborasi pemerintah mampu bersinergi dengan semua pihak dalam mencapai tujuan pemerintahan. Keterlibatan pihak non-pemerintah dalam tata kelola pemerintahan akan memberi banyak kontribusi baik dari sisi anggaran maupun sisi inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang ada, khususnya melalui jalinan kolaborasi yang dibangun. Hal tersebut menjadi penting mengingat dengan keterlibatan berbagai elemen dalam tata kelola pemerintahan akan memunculkan inovasi-inovasi baru serta rasa memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan pemerintahan yang ada. Demikian pula halnya dalam kegiatan pengelolaan pariwisata yang menjadi *leading sector* unggulan setiap wilayah di Indonesia dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah, menjadi trend tersendiri di era Revolusi Industri 4.0. Kreatifitas, Inovasi serta kemampuan mengkreasi dan menemukan terobosan-terobosan baru di dunia pariwisata menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah di era Revolusi Industri 4.0 saat ini.

Potensi alamiah yang dimiliki berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai karakteristiknya menjadi aset yang tak ternilai dalam pengembangan pariwisata dewasa ini. Bagaimana cara membungkus potensi yang ada tadi menjadi sebuah produk pariwisata yang mampu untuk di tawarkan dan di jual. Spirit ini mendorong pemerintah daerah bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli

Daerah serta wahana penyiapan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dengan kata lain, pengembangan sector pariwisata akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mensejahterahkan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, melestarikan alam dan lingkungan serta menjaga nilai budaya yang ada. Dimana menurut Hidayat, dkk (2019:176) kebudayaan Indonesia menjadi aset pariwisata yang sangat bernilai dan bermanfaat dimana didalamnya terdapat berbagai macam kegiatan kesenian, berbagai tradisi yang ada yang menjadi ciri khas suatu daerah. Sejalan dengan pendapat Hidayat, Praiijing sebagai salah satu kampung wisata di kabupaten sumba barat provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki potensi-potensi yang cukup unik dan menarik untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi NTT.

Kampung wisata Praiijing merupakan wisata potensial dimana dalam kampung wisata tersebut menggambarkan kebudayaan masyarakat Sumba yang terdapat hamparan batu megalitikum serta rumah adat tradisional serta berbagai cirikhas kebudayaan dan kehidupan masyarakat Sumba lainnya. Adapun aktivitas yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan ketika berkunjung di kampung wisata Praiijing berupa spot foto dengan latar Batu Megalitikum serta spot-spot lain yang telah disediakan. Pengunjung juga dapat mengenakan pakaian khas adat Sumba Barat yang cukup unik, khususnya pakaian adat dengan corak tenun Sumba yang cukup terkenal. Pengunjungpun juga dapat membeli oleh-oleh khas Sumba yang cukup terkenal berupa kain/sarung dengan corak tenun khas Sumba yang unik, eksotik dengan corak warnanya yang khas.

Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung di kampung wisata Praiijng dari Tahun 2013 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Kunjungan Wisatawan di kampung wisata praiijng Tahun 2013 - 2020

No	Tahun	Jumlah Kunjungan (orang)
1	2013	1456
2	2014	1678
3	2015	1895
4	2016	2345
5	2017	4576
6	2018	15798
7	2019	16253
8	2020	7800

Sumber : BUMDes IYYA TEKKI Desa tebara
(Dikelola Oleh Penulis)

Dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah kunjungan wisatawan di kampung wisata praiijng pada tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lonjakan pengunjung cukup tinggi pada tahun 2019, dengan jumlah pengunjung mencapai 16.253 wisatawan. Sementara jumlah kunjungan paling sedikit di tahun 2013 sebanyak 1456 wisatawan. Bahkan di era pandemic covid-19 jumlah pengunjung masih tinggi yaitu 7800 pada tahun 2020 meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi dalam kondisi pandemic covid-19 jumlah pengunjung masih lebih tinggi dari sebelum tahun 2017 menunjukkan animo masyarakat berkunjung ke kampung wisata Praiijng cukup tinggi. Adapun pengunjung kampung wisata Praiijng terdiri dari wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Dari data table yang ada menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya akan memberi dampak pada jumlah

pendapatan di Kampung wisata Praiijng baik itu kepada pengelolanya maupun kepada masyarakat Desa Tebara. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya tidak akan menjamin konsistensi jumlah pengunjung di tahun-tahun berikutnya tanpa adanya inovasi, keunggulan kompetitif dan pelayanan yang berkualitas ditambah lagi keberadaan kampung wisata serupa yang ada di Kabupaten Sumba Barat menjadi tantangan bagi pengelola untuk mempertahankan jumlah kunjungan wisatawan.

Pengelolaan Kampung wisata praiijng di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa Iyya Tekki atau disingkat dengan BUMDes Iyya Tekki dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Tebara. Dimana kedua pengelola tersebut harus mampu menjalankan kegiatan pariwisata yang ada dikampung wisata praiijng, namun keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi hal yang berpengaruh bagi pengelolaan kampung wisata Praiijng dimana rata-rata pendidikan pengelola baik yang ada di BUMDes Iyya Tekki maupun di Kelompok Sadar Wisata masih berijazah SMA serta belum memiliki pengalaman yang baik dalam dunia pariwisata. Menurut Sedarmayanti bahwa kehidupan di eraglobal memerlukan tenaga yang berkualitas yaitu manusia yang dapat berdaya saing dalam arti positif, dapat bekerjasama, kreatif dan inovatif sehingga hasil karya/produk yang dihasilkan dapat berkompetisi untuk mengarah pada kualitas yang semakin lama semakin meningkat (Sedarmayanti 2014 :114).

Terkait dengan hal tersebut di atas dibutuhkan Proses tatakelola Kolaborasi dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng dengan peran antar stakeholder secara strategis dan sinergis guna mengatasi masalah-masalah yang ada dikampung

wisata yang sangat kompleks dan tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Sehingga kedepannya kampung wisata tersebut dapat lebih baik dan lebih berkembang (Dwiyanto dalam Deden 2020: 86-87).

Metode

Metode descriptive kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam tulisan ini. Sementara teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi serta observasi.

Kajian Teoritis.

Collaborative Governance atau dikenal juga dengan Tata Kelola Kolaboratif merupakan perubahan dari *government* ke *Governance*. dimana perubahan ini lebih memfokuskan pada sisi administrasi publik sedangkan *Government* lebih mengarah pada Institusi pemerintah, berbeda dengan *governance* lebih menekankan pada keterlibatan kelompok diluar pemerintah dalam hal ini pemangku kepentingan dan masyarakat.(Sari dalam Oswar Mungkasa 2014:15).

Menurut Emerson dkk (2012:2), *Collaborative Governance* sebagai proses struktur dalam sebuah manajemen yang pengambilan keputusan kebijakan publik melibatkan beberapa aktor yang konstruktif dan bersal dari berbagai sektor baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan, jika dikerjakan oleh satu pihak saja maka tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Sedangkan menurut Dwiyanto (2011: 34) dalam *Collaborative Governance* terjadi penyampaian Visi, tujuan maupun strategi dalam aktivitas yang dilakukan antara pihak pihak yang melakukan kerjasama untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas

dalam mengelola dengan tunduk pada kesepakatan bersama.

Dalam tulisan ini, teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash digunakan sebagai dasar pijakan dimana teori tersebut menyebutkan bahwa “ *a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non – state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*” (Ansell dan Gash 2007: 544). Dengan artian *Collaborative Governance* adalah model pengendalian dimana satu atau beberapa lembaga publik melibatkan para *stakeholders non State* atau para pemangku kepentingan diluar lembaga publik dalam proses pengambilan kebijakan kolektif yang bersifat formal, konsensus dan deliberatif dengan tujuan untuk membuat serta menerapkan kebijakan publik dan mengelola program publik (Ansell and Gash dalam Islamy, 2018 :2).

Dalam *Collaborative Governance*, Ansell dan Gash memiliki 4 (empat) Dimensi yang menjadi rujukan yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi. Kondisi Awal dalam *Collaborative Governance* sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, masalah/konflik serta modal sosial yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam *Collaborative Governance*. Desain kelembagaan menjadi aturan dasar dalam kegiatan kolaborasi, serta kepemimpinan yang menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam *Collaborative Governance*. Sedangkan Proses Kolaborasi menjadi inti dari *Collaborative Governance* dimana dalam proses kolaborasi terdapat *Face to face Dialogue*, membangun Kepercayaan, membangun komitmen,

berbagi pemahaman serta hasil sementara.(
Ansell and Gash dalam Islamy 2018:12-14).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Proses Kolaborasi dalam Pengelolaan
Kampung Wisata Praiijng

a. Kondisi Awal (*starting condition*)

Pada tahun 2012 seorang pemuda bernama Marthen bersama beberapa pemuda kampung Praiijng berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung Adat Praiijng untuk terlibat menjadi pelaku pariwisata. Meskipun pada awalnya mereka banyak menemui kendala, seperti ketidaksiapan masyarakat, ketidakpahaman tentang seluk beluk pariwisata dan berbagai kendala lainnya. Dengan kata lain kemampuan Sumber Daya yang masih sangat kurang dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng pada saat itu. Kondisi tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Erianti (2018:11) bahwa Sumber daya menjadi masalah dalam setiap kegiatan. Adapun Akses dari Sumber Daya yakni ketersediaan sumber keuangan, sumber daya teknis, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam proses kolaborasi. Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya kunjungan wisata setiap hari di kampung wisata Praiijng, secara tidak langsung masyarakat banyak melakukan interaksi dengan para wisatawan dan pengggagas kampung wisata Praiijng tersebut. Dari interaksi yang ada para pengggagas dan masyarakat melakukan upaya bersama melalui musyawarah dan diskusi bersama mengenai upaya memajukan dan mengembangkan kampung wisata Praiijng. Upaya melibatkan masyarakat secara langsung baik dalam kegiatan musyawarah

maupun melalui kegiatan diskusi dan bertukar pikiran diantara pihak pihak yang terlibat secara pelan tapi pasti pada akhirnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata di kampung mereka, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal Kampung Adat Prai Ijing (Hidayana dkk 2019: 184-185)

Menurut Ansell and Gash (2007:550) Kondisi awal ini yang kemudian menjadi pemicu timbulnya keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk turut terlibat. Keinginan atau kebutuhan kolaborasi akan timbul apabila telah merasakan suka duka bersama ataupun pernah mengalami kegagalan bersama, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesetiakawanan melalui bentuk kerjasama bersama atau kolaborasi. Suka duka bersama para pengggagas dan masyarakat kampung Praiijng menjadi kondisi awal yang membangkitkan keinginan, insentif dan kebutuhan untuk berkolaborasi di antara masyarakat dan pengggagas kampung wisata Praiijng.

b. Desain Kelembagaan (*institutional design*).

Menurut Ansell And Gash (2007 : 555-557) bahwa Aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia.

Dalam pengelolaan Kampung wisata praiijng Kolaborasi yang terbangun didasarkan pada hubungan keyakinan dan

kepercayaan serta kesamaan tujuan. Mereka berinteraksi dan bernegosiasi baik secara formal maupun informal dalam sebuah aturan yang disepakati. Untuk mendukung hal tersebut dimulai dari pembentukan Lembaga - lembaga yang mengelola kampung wisata Praiijng. Dalam hal ini pengangkatan pengurus kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) kampung Praiijng di Desa tebara Kecamatan Kota Waikabubak yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 dan dijabarkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tebara Nomor Kep/15/TBR/I/2020. Di sisi lain juga ada kelembagaan yang juga bersama dengan Kelompok Sadar Wisata untuk memfasilitasi kampung wisata Praiijng melalui Badan Usaha Milik Desa Tebara yaitu Bumdes Iyya Tekki melalui Peraturan Desa tebara Nomor 04/TBR/53.12/2018 tentang Badan Usaha Milik Desa Iyya Tekki. Dimana kampung wisata Praiijng masuk dalam Bisnis usaha bersama sesuai dengan pasal 10 ayat 2 butir (b) yang menyatakan bahwa Kampung wisata Praiijng masuk dalam Bisnis Bersama Bumdes Iyya Tekki yang kepengurusannya dijabarkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Iyya Tekki masa Bakti 2018-2021. Menurut Pitana dan Diarta (2013: 118) regulasi adalah kewenangan yang didapatkan dari instansi atau organisasi guna mengelola dan mengatur kegiatan yang berada didalam wilayah hukumnya. Dalam hal ini Bumdes dan Pokdarwis merupakan lembaga pengelolaa yang diberikan mandat dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng.

Dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Goddard (2006:26-28) dalam tulisannya yang berjudul “*Third Sector in Partnership*

arrangements” ada lima sifat kunci hubungan kemitraan antara pemerintah dengan non-pemerintah. Pertama terkait *Shared aims* yaitu saling percaya, sejajar dan *resipositas*; Kedua *Trust* (organisasi yang berpartisipasi saling percaya untuk mencapai tujuan). Ketiga *resiprositas*, terdapat manfaat dari proses kerjasama); Keempat *equity* terciptanya keadilan dan kekuasaan (*shared power*); Kelima *shared funding* adanya Komitmen dan transparan.

c. Kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*).

Kepemimpinan fasilitatif menjadi factor yang mempengaruhi keberhasilan prose kolaborasi hal ini sebagaimana di kemukakakn oleh Ansell dan Gash (2007:554-555) mensyaratkan pimpinan lembaga tata kelola kolaboratif adalah seorang pemimpin fasilitatif, yang sanggup memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama di meja perundingan, bertatapmuka, membangun rasa saling percaya, berkomitmen, membuat rencana strategi, peta jalan, visi-misi dan tujuan bersama yang disepakati secara konsensus.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan Kampung wisata Praiijng di Desa Tebara bahwa kepala Desa tebara dapat disebut sebagai pemimpin yang fasilitatif, mengingat posisinya yang dapat menjalin komunikasi atau penghubung antara Pemerintah, Swasta, akademisi dan masyarakat. Mendorong Pengelolaan Kampung wisata praiijng dengan terus melakukan pendampingan kepada pengelola kampung wisata dan masyarakat kampung wisata Praiijng. Serta kepala desa tebara juga memfasilitasi pertemuan atau diskusi antar stakeholder yang terlibat. Menurut crainer dalam fridayana (2013 :30) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan aktifitas untuk

dapat mempengaruhi orang lain, dalam hal ini peranan kepala desa mampu mempengaruhi masyarakat kampung wisata Praiijng untuk mampu berbenah.

d. Proses Kolaborasi

Ansell dan Gash (2007 :557-561) mendefinisikan 3 (tiga) tahapan proses kolaborasi yaitu *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan pelaksanaan. Proses kolaborasi yang terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang hanya bergantung pada pencapaian yang mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog tatap muka (Face to Face), membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan hasil sementara.

Dalam Proses Kolaborasi di kampung wisata praiijng, Pemerintah selalu melakukan Pendekatan melalui dialog dan berdiskusi bersama dengan masyarakat dan pengelola kampung wisata Praiijng. Setiap bulan selalu dilakukan rapat rutin membahas terkait dengan pengelolaan kampung wisata Praiijng. Dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng membangun kepercayaan merupakan bagian dari proses kolaborasi yang turut dalam membantu proses keberlangsungan kampung. Hasil wawancara dengan kepala desa Tebara ditemukan fakta bahwa dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat kepala desa berupaya membangun kepercayaan pada masyarakat kampung wisata praiijng bukan hanya kepada pihak- pihak yang sepaham tetapi juga tetapi juga dengan pihak – pihak yang

dulu tidak memilih yang bersangkutan sebagai kepala desa, sehingga dengan jalinan tersebut dapat meminimalisir konflik yang mungkin saja terjadi.

Faktor Penghambat dan Pendukung.

Dalam penelitian ini peneliti mencermati faktor-faktor pendukung internal yang mempengaruhi Pengelolaan Kampung wisata Praiijng, yang menjadi fokus analisis adalah sumber daya (SDA dan SDM) kelembagaan, strategis, masyarakat, atraksi budaya, sarana dan prasarana penunjang. Dengan analisis ini akan teridentifikasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi. Dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng ini kualitas Sumber Daya manusia menjadi kelemahan, hal ini di karenakan latar belakang pendidikan serta kurang professional pengelola dalam mengelola kampung wisata menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Hal ini terbukti dari tidak konsistennya pengelola untuk mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah di tetapkan melalui AD/ART Badan Usaha Milik Desa IYYA Tekki. Sedangkan secara eksternal faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses kolaborasi di kampung wisata Praiijng adalah Kebijakan Pemerintah daerah, Aksebiliti Daerah, teknologi, Daya saing objek wisata sejenis, serta pergeseran nilai budaya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kampung wisata praiijng, belum berjalan efektif dilihat dari kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi yang menghasilkan model kolaborasi di kampung wisata Praiijng. Hal tersebut disebabkan karena

pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng di lapangan seperti Budaya, lembaga pengelola, anggaran, Letak Geografis, kualitas SDM yang kurang, Atraksi Budaya yang tidak dikemas dengan baik, dan adanya sebagian Penataan Infrastruktur umum yang mengurangi nilai kampung wisata Praiijng. Sedangkan Faktor Eksternalnya dilihat dari Kebijakan Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang dikeluarkan guna mendukung Sistem kepariwisataan, pemanfaatan Teknologi sebagai sarana promosi pariwisata di kampung Praiijng, dan juga Aksebiliti daerah yang sangat strategis. Disisi lain terdapat ancaman dari factor eksternal berupa Daya saing Objek wisata sejenis serta Pergeseran Nilai Budaya akibat dari Perkembangan teknologi dan Informasi.

Pengelolaan Kampung wisata Praiijng diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sebagai pelaku kebijakan dalam bidang kepariwisataan melalui jenjang pendidikan yang bersifat formal maupun non formal. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya baik lembaga pemerintah, swasta, akademisi, media untuk menciptakan investasi baru dalam rangka mengembangkan Pengelolaan kampung wisata Praiijng sehingga mampu mengatasi faktor –faktor yang menghambat proses *Collaborative Governance*.

Daftar Pustaka:

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance In Theory And Practice*. 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif*. Gajah Mada University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework For Collaborative Governance. Journal Of Public Administration Research And Theory*, 22(1), 1–29.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Ervianti, Meiga. 2018. Faktor-faktor yang menghambat Collaborative Governance dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota pekanbaru. *Jurnal JOM FISIP*. Univ. Riau.
- Goddard, Jodi. 2006. *Third Sector in Partnership arrangements, paper presented at Australia and new Zealand third sector research eighth biennial conference. Adeleide*.
- Hidayana, Fransiska, dkk. 2019. Tanggapan Wisatawan dan perkembangan Pariwisata Kampung Adat Praiijng. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Akademi Pariwisata Bali - Denpasar*.
- Islamy, L. O. S. 2018. *COLLABORATIVE GOVERNANCE Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mungkasa, Oswar. 2020. Makalah Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan. *Academia.edu: Bappenas Jakarta*.
- Pitana, I Gede dan Surya Diarta, I Ketut. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Saputra, Deden. 2020. *Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Sedarmayanti, 2014, *Membangun dan Mengembangkan Kdan Industri Pariwisata (bunga rampai tulisan pariwisata)*. Bandung: Refika Aditama.
- Yudiaatmaja, Fridayana, 2013. *Kepemimpinan: Konsep, Teori dan Karakternya*. Jurnal Media Komunikasi FIS: Universitas Pendidikan Ganesha.

Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisataaan.

Keputusan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 dan
dijabarkan melalui Surat Keputusan
Kepala Desa tebara Nomor
Kep/15/TBR/I/2020 Kelompok sadar
wisata Kampung Praiijing.

Peraturan Desa tebara Nomor
04/TBR/53.12/2018 tentang Badan
Usaha Milik Desa Iyya Tekki.